

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Qatar sebagai negara yang luasnya relatif kecil di Teluk Arab, masih secara tidak langsung menggunakan Al Jazeera sebagai salah satu instrumen diplomasi publiknya. Hal ini tercermin dari sejumlah pola dari artikel berita yang dirilis oleh Al Jazeera mengenai reformasi Sistem Kafala menjelang Piala Dunia 2022, dimana Al Jazeera hampir selalu mengutip pernyataan pemerintah Qatar di akhir artikelnya setelah pada awal artikel berita menyuarakan kritik-kritik dari berbagai pihak termasuk organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia hingga opini masyarakat internasional mengenai sistem Kafala dan juga reformasinya.

Secara keseluruhan, strategi diplomasi publik Qatar melalui Al Jazeera dijalankan bukan melalui komunikasi negara yang bersifat langsung dan defensif, melainkan melalui praktik *international broadcasting* yang mengandalkan kredibilitas jurnalistik, keberimbangan narasumber, dan framing isu yang kontekstual. Dalam tayangan *Inside Story* maupun artikel-artikel berita terkait reformasi sistem Kafala, Al Jazeera secara konsisten menampilkan realitas pekerja migran, mulai dari kondisi kerja; keterlambatan upah; hingga tingginya angka kematian, dengan merujuk pada laporan organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan International Labour Organization, serta menghadirkan suara pekerja migran dan pakar independen. Pola ini sejalan dengan kerangka *international broadcasting* Nicholas J. Cull (2009) yang menekankan pentingnya *credibility* dan *overheard messages*, di mana pesan tidak disampaikan sebagai pembelaan eksplisit negara, tetapi dibiarkan dibentuk melalui fakta, testimoni, dan otoritas non-negara yang sah. Pada saat yang sama, Al Jazeera juga secara sistematis menyertakan pernyataan resmi pemerintah Qatar mengenai reformasi Kafala, peningkatan inspeksi ketenagakerjaan, dan kerja sama dengan ILO, sehingga kritik yang muncul tidak berdiri sebagai delegitimasi negara, melainkan sebagai tantangan implementasi dalam proses reformasi struktural yang sedang berlangsung.

Keterkaitan antara liputan reformasi Kafala dan kritik Qatar terhadap media Barat menjelang Piala Dunia 2022 memperlihatkan bagaimana Al Jazeera berfungsi sebagai ruang artikulasi narasi tandingan (*counter-narrative*) dalam kontestasi wacana global. Dengan mengangkat klaim pemerintah Qatar mengenai distorsi data kematian pekerja migran, standar ganda, serta unsur rasisme dan Islamofobia dalam sebagian pemberitaan Barat, Al Jazeera tidak hanya menyampaikan posisi negara, tetapi juga mendorong audiens internasional untuk menilai ulang legitimasi kritik yang beredar. Dalam perspektif Marshall McLuhan, kondisi ini memperlihatkan Al Jazeera beroperasi sebagai *cool media secara situasional*, karena makna pemberitaan tidak disajikan secara final dan satu arah, melainkan menuntut partisipasi aktif audiens untuk menegosiasikan berbagai narasi yang saling berkompetisi. Ketika dikaitkan kembali dengan konsep diplomasi publik Cull, fungsi advokasi dan *international broadcasting* Al Jazeera terlihat bekerja secara simultan: menjaga kredibilitas media global sembari menyediakan ruang bagi negara untuk membangun legitimasi dan mempertahankan citra internasionalnya. Dengan demikian, kontribusi Al Jazeera terhadap diplomasi publik Qatar tidak terletak pada promosi langsung reformasi sistem Kafala sebagai pencapaian normatif, melainkan pada kemampuannya membingkai isu secara kompleks, berlapis, dan terbuka terhadap kritik, sehingga strategi diplomasi publik Qatar dijalankan melalui praktik jurnalistik yang tampak independen namun tetap strategis.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Praktis

Secara praktis, periode penelitian 2020–2022 sebaiknya diperlakukan sebagai momentum diplomatik yang strategis karena mencakup fase pengesahan reformasi kafala, meningkatnya tekanan internasional, dan penyelenggaraan Piala Dunia 2022, sehingga analisis dapat menautkan intensitas dan arah liputan Al Jazeera dengan dinamika perhatian global terhadap Qatar. Pemilihan data perlu dibatasi pada jenis artikel tertentu—seperti laporan berita, analisis, dan pernyataan resmi—agar konsistensi framing dapat dibandingkan secara sistematis tanpa tercampur opini personal. Penelitian juga perlu menegaskan sejak awal bahwa fokusnya bukan menilai keberhasilan reformasi kafala secara normatif, melainkan

mengkaji bagaimana reformasi tersebut direpresentasikan sebagai narasi diplomasi publik untuk membangun legitimasi internasional. Dengan pembatasan ini, hasil penelitian akan lebih terarah, aplikatif, dan memiliki kontribusi yang jelas bagi kajian diplomasi publik, komunikasi internasional, dan studi media Timur Tengah.

VI.2.2 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian ini perlu memperjelas posisi Al Jazeera sebagai bagian dari *international broadcasting* yang beririsan dengan kepentingan negara, sehingga tidak terjebak pada dikotomi media independen versus media pemerintah, melainkan dipahami sebagai instrumen diplomasi publik yang memiliki otonomi terbatas namun strategis. Konsep “strategi diplomasi publik” sebaiknya dioperasionalkan secara jelas melalui indikator yang dapat dianalisis dalam teks berita, seperti pola framing, pemilihan narasumber, repetisi isu reformasi kafala, serta konsistensi narasi dalam merespons kritik internasional. Kerangka diplomasi publik Nicholas J. Cull perlu digunakan secara selektif, terutama pada aspek *advocacy* dan *international broadcasting*, untuk menjelaskan bagaimana Qatar merepresentasikan kebijakan reformasinya kepada audiens global.